



LAPORAN KINERJA

KEC. SUNGAI PINANG

2025

Prepared by
Perencanaan Program & Keuangan

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena tim penyusun LKj Kecamatan Sungai Pinang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada Masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang.

Kinerja Kecamatan Sungai Pinang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjiaan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan unsur wilayah ditahun mendataKami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan, kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 2 Februari 2026

Pt. Camat Sungai Pinang



DIDIK PURWANTO, S.STP, M.Si
NIP. 198304152001121005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 sekaligus memenuhi amanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisikan Gambaran Umum, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah OPD yang melayani sektor publik, Kecamatan Sungai Pinang mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis yang hendak dicapai demi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dari uraian diatas dan mengacu dengan tujuan Kota Samarinda, maka Kecamatan Sungai Pinang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana Pemerintah yang harus dilaksanakan agar menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan.

Dari uraian tersebut diatas, Kecamatan Sungai Pinang menetapkan sasaran strategis dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi	4
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Sumber Daya Aparatur.....	13
E. Aspek Strategis dan Permasalahan	14
F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	16
G. Sistematika Penyajian	19
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi dan Misi	22
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	24
3. Strategi dan Kebijakan.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	54
C. Prestasi/ Penghargaan	XX
BAB.IV PENUTUP	68

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Sungai Pinang merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Samarinda.

Sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Sungai Pinang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang , terdiri dari 5 Kelurahan yaitu, Kelurahan Bandara, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Gunung Lingai , Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Walikota yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

➤ Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP

2. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Lakip dan tata cara review
3. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP
4. Peraturan Walikota Samarinda No.11 Tahun 2024 tentang pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda
5. Permenpan 22 Tahun 2024 tentang penilaian Kinerja Organisasi

➤ **Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan Sungai Pinang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi.

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;

- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

TUGAS DAN FUNGSI

CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - i. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya;

- k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. pelaksanaan program Sekretaris;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - g. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan keuangan Kecamatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyiapan bahan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Sungai Pinang sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda terdiri dari 7 Bidang dengan rincian sebagai berikut:

- **Camat.**
- **Sekretaris Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan**
 - b. Sub Bagian Umum**



- **Seksi Pemerintahan Umum & Trantib**
- **Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat**
- **Seksi Kebersihan & Lingkungan Hidup**
- **Seksi Ekonomi Pembangunan**
- **Seksi Pelayanan Umum**

Dan Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 Kelurahan :

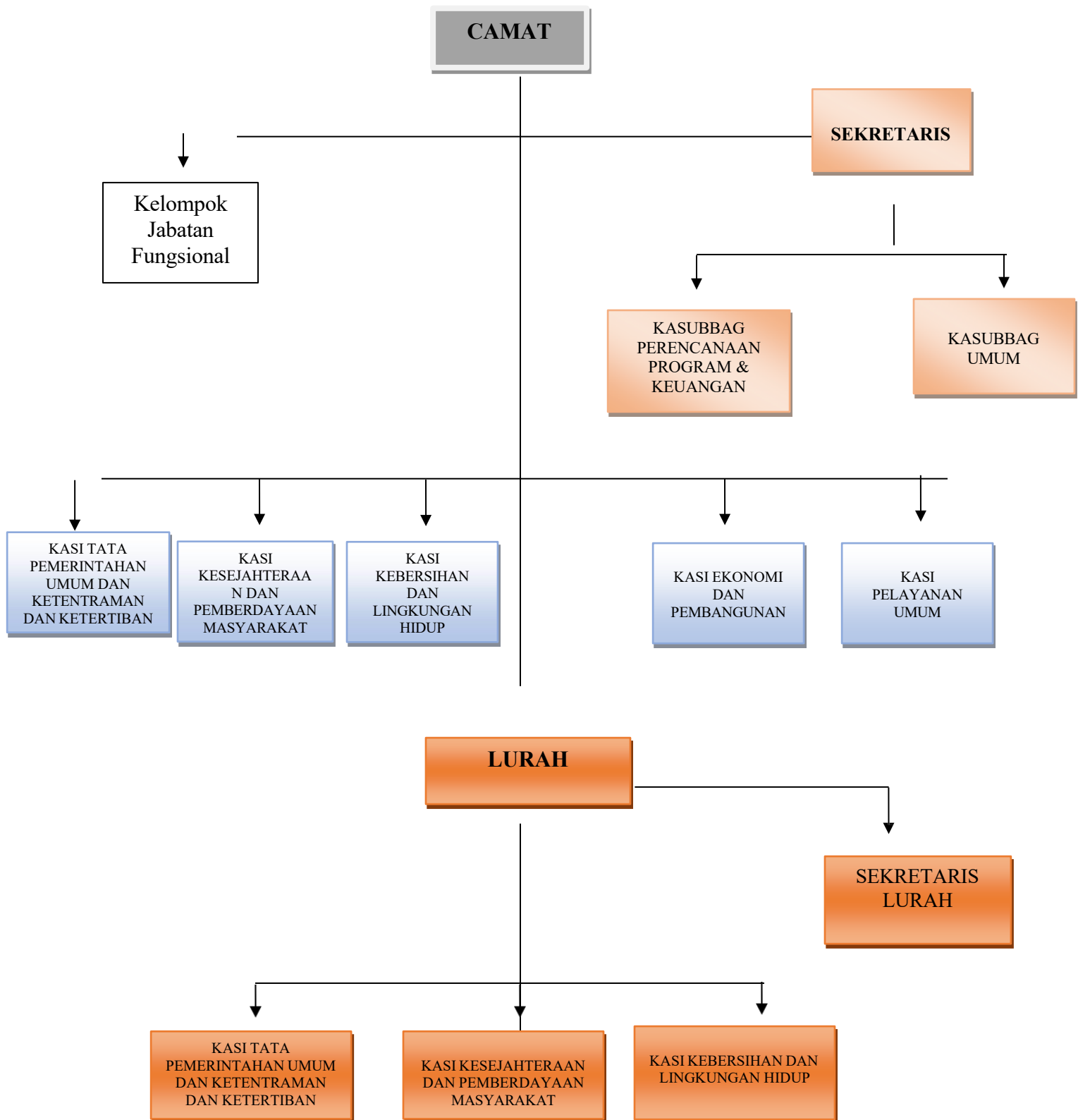
- **Kelurahan Temindung Permai**
- **Kelurahan Sungai Pinang Dalam**
- **Kelurahan Bandara**
- **Kelurahan Gunung Lingai**
- **Kelurahan Mugirejo**

Dengan Susunan Organisasi satuan kerja Kelurahan terdiri atas :

- **Lurah**
- **Sekretaris Lurah**
- **Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban**
- **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda



D. SUMBER DAYA APARATUR

Sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Sungai Pinang dan 5 (lima) Kelurahan Kota Samarinda sebanyak 69 orang, Pegawai PPPK Penuh Waktu sebanyak 24 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Sungai Pinang

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	69
2	PPPK Penuh Waktu	24
3	PPPK Paruh Waktu	28
	Jumlah	121

Dengan melihat pada kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, jumlah SDM di Kecamatan Sungai Pinang Dan Kelurahan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Tetapi dari segi kualitas harus lebih ditingkatkan dalam mencapai Pelayanan Prima karena lebih dari 50% pegawai merupakan lulusan S1.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	15
2	Golongan III	52
3	Golongan IV	2
	Jumlah	69

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

E. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan aspek strategis Kecamatan Sungai Pinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Sungai Pinang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aspek Strategis Kecamatan Sungai Pinang
 - a. Struktur Organisasi dan tata kerja di Kecamatan Sungai Pinang berdasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, wilayah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota Samarinda.
 - b. Dibutuhkan mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.
2. Berdasarkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
 - a. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam pembangunan Pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah harus didorong sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi pemuda, dan kalangan usia produktif Pemuda, kalangan usia produktif didorong dalam usaha mandiri untuk meningkatkan produktifitas hasil kerajinan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha. Berdasarkan prosedur.

2. Operasional pelayanan PATEN Pelayanan PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai slogan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Pinang harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif dan dikomunikasikan kepada masyarakat. PATEN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
3. Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Sungai Pinang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Tabel 2.4

Progres Nilai AKIP Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2023	57.20	C
2	2024	74	BB

Tabel 2.5

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Tindak Lanjutnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat Dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan tepat waktu dengan melampirkan bukti tangkap layar dari website OPD dan Menpan	Melengkapi dokumen tersebut



2	Membuat Dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dengan membuat Tujuan dan sasaran, dan indikator sasaran dalam Renja selaras dengan Renstra	Melengkapi dokumen tersebut
3	Membuat Kualitas rumusan hasil (tujuan / sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan menselaraskan Tujuan / sasaran RENJA, IKU tahunan, Perjanjian Kinerja telah selaras dengan tujuan / sasaran kinerja di atasnya (RENSTRA)	Melengkapi dokumen tersebut
4	Membuat Target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan membuat Fomulasi perhitungan target dan sumber data yang dilampirkan secara rinci bagaimana cara menghitung beserta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan	Melengkapi dokumen tersebut
5	Melakukan pemantauan Rencana aksi kinerja secara berkala dengan melampirkan jadwal monitoring sesuai rencana aksi yang ditentukan. Selain itu mengunggah Bukti rapat per triwulan sesuai jadwal monitoring	Melengkapi dokumen tersebut
6	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan membuat SOP pengumpulan data kinerja	Melengkapi dokumen tersebut
7	libatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam	Melengkapi dokumen tersebut



	mengukur capaian kinerja dengan melampirkan Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan	
8	Mengumpulkan Data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dengan melampirkan seluruh Data dukung IKU	Melengkapi dokumen tersebut
9	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi dengan melampirkan Laporan pengukuran kinerja	Melengkapi dokumen tersebut
10	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) pada pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan menggunakan aplikasi atau spreadsheet & google drive dan aplikasi lain yang relevan	Melengkapi dokumen tersebut
11	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Melengkapi dokumen tersebut
12	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Melengkapi dokumen tersebut
13	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Melengkapi dokumen tersebut
14	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran	Melengkapi dokumen tersebut



	dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	
15	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Melengkapi dokumen tersebut
16	Memberikan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja untuk setiap unit dan sub unit	Melengkapi dokumen tersebut
17	Memformalkan Dokumen Laporan Kinerja dengan memberikan nomor surat	Melengkapi dokumen tersebut
18	Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja pada website OPD dan Menpan	Melengkapi dokumen tersebut
19	Melengkapi substansi Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar	Melengkapi dokumen tersebut
20	Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan mengundang seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan dalam pembahasan capaian kinerja	Melengkapi dokumen tersebut
21	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan mencantumkan laporan Monev per triwulan yang dapat merubah aktivitas kinerja/ tidak ada perubahan aktivitas	Melengkapi dokumen tersebut
22	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dengan melampirkan Laporan monev per triwulan yang dimanfaatkan untuk penyesuaian penggunaan anggaran dan kegiatan dalam mencapai kinerja	Melengkapi dokumen tersebut



23	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dengan melampirkan rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja	Melengkapi dokumen tersebut
24	Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan melampirkan sertifikat atau daftar hadir beserta undangan mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshop AKIP	Melengkapi dokumen tersebut
25	Melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Kertas kerja pendukung evaluasi, faktor permasalahan, faktor hambatan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dilengkapi data dan bukti dukung	Melengkapi dokumen tersebut

G. SISTEMATIK PENYAJIAN

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- c. Struktur Organisasi
- d. Sumber Daya Aparatur



- e. Aspek Strategis dan Permasalahan
- f. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
- g. Sistematika Penyajian

BAB.II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- 1. Visi dan Misi
- 2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
- 3. Strategi dan Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi/ Penghargaan

BAB.IV PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025 menguraikan target Kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan Benchmark (Studi Banding) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam rencana kerja Tahun 2025 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1) **Visi Dan Misi**

Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda menetapkan visinya adalah :

“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)”

2) Misi

Misi adalah Suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

Misi :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel

Strategi :

- Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik
- Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja

Kebijakan :

- Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik,

serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan

- Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tujuan Kecamatan Sungai Pinang

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Indeks	4.30	4.65

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan sasaran kecamatan sungai pinang, adapun Indikator sasaran kecamatan sungai pinang adalah :

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan

Tabel 2.7

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				KE -				
2025	2026	2027	2028	2029				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		4.30	4.50	4.55	4.60	4.65
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan (Indeks)		3.50	3.65	3.75	3.85	4.00

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sungai Pinang Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		76.00	77.35	77.45	77.50	77.65
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81.55	90.00	90.25	90.50	91.00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan		91%	92%	93%	94%	95%
		Program Pemberdayaan	Persentase Usulan		90%	91%	92%	93%	94%

		Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui						
--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.9

Adapun IKU Kecamatan Sungai Pinang
Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029
					6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Indeks		3.50	3.65	3.75	3.85	4.00

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

a. Strategi

Untuk merelisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
- Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik
- Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja

b. Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan resmi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Kecamatan Sungai Pinang

Visi : Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan	1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi



Visi : Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Publik di Kecamatan	Sistem Pelayanan Publik	dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam mendiskusikan isu – isu public dan mencari solusi Bersama terkait pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3.50

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 3 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan pada Tahun 2025.

Pembagian program dan kegiatan dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 1. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang
 2. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai
 3. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 4. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Bandara
 5. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai
 6. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan
 2. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
 3. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai

4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 5. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bandara
 6. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai
 7. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo
 8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai
 9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara
 11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
 12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
1. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Pinang)
 2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Temindung Permai)
 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Sungai Pinang Dalam)
 4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Gunung Lingai)
 5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Bandara)
 6. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Mugirejo)

- 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
 - b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 5. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 2. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas perorangan dinas opsional lapangan
 3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pelaporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Sungai Pinang.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja. Secara umum terdapat

beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian terdapat juga beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan.

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Hingga akhir Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3.50	3.97	113.43

Analisis pencapaian indicator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,97}{3,50} \times 100\% = 113,43\%$$

Artinya, capaian kinerja mencapai 113,43% dari target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 3,97 melampaui target 3,50, dengan tingkat capaian 113,43%. Dengan tingkat capaian 113,43%, indikator kinerja sasaran dinilai sangat berhasil karena realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 0,47 poin. Hal ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan kinerja organisasi yang optimal bahkan melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan.

Faktor-Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

a. Perencanaan yang Efektif

Penetapan program dan kegiatan selaras dengan indikator kinerja sehingga pelaksanaan lebih terarah.

b. Implementasi yang Optimal

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan.

c. Dukungan Sumber Daya

Ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai turut memperkuat pencapaian target.

d. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Adanya pengawasan dan evaluasi rutin memungkinkan perbaikan cepat terhadap kendala yang muncul.

e. Komitmen dan Koordinasi Tim

Kerja sama dan komitmen pelaksana program berkontribusi besar terhadap hasil yang dicapai.

Dampak Keberhasilan

- Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas organisasi.
- Memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan/kinerja.
- Menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan target pada periode berikutnya.
- Dapat dijadikan praktik baik (best practice) dalam perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.4

**Persentase realisasi keuangan dan realisasi kinerja
Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan &
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Se-Kecamatan Sungai Pinang
Tahun 2025**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Temindung Permai)	2.451.000.000	2.450.969.850	100	39	39	RT	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sungai Pinang Dalam)	8.049.200.000	8.048.386.600	99.99	114	114	RT	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bandara)	2.082.692.500	2.081.370.000	99.94	32	32	RT	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Gunung Lingai)	1.627.800.000	1.623.950.000	99.76	23	23	RT	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mugirejo)	3.070.681.250	3.070.453.600	99.99	43	43	RT	
6	Pemberdayaan Masyarakat di	2.089.637.932	2.089.358.511	99.99	3	3	Pokmas /Ormas	

	Kelurahan (Temindung Permai)							
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Pinang Dalam)	4.874.833.955	4.820.207.019	98.88	3	3	Pokmas /Ormas	
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bandara)	1.277.309.296	1.276.941.824	99.97	3	3	Pokmas /Ormas	
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gunung Lingai)	1.125.812.114	1.124.840.753	99.91	2	2	Pokmas /Ormas	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mugirejo)	1.868.440.651	1.857.450.994	99.41	4	4	Pokmas /Ormas	

2. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70.55	89.23	81.00	90.4	-	-

2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	60%	100	70 %	99.96	-	-
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	-	-	-	-	3.50	3.97

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja
				2025
1	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pelayanan	4.25	3.50

	Pelayanan Publik di Kecamatan	Publik (IPP) Kecamatan		
--	-------------------------------------	---------------------------	--	--

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.7

Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	
			Kinerja	Target	Realisasi
			2025	2025	2025
			NIHIL		

Dikarenakan Kecamatan tidak melaksanakan urusan wajib layanan dasar, sehingga tidak ada indikator SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

1. Komitmen dan Kepemimpinan

Pimpinan mampu mengoordinasikan secara efektif, memberikan arahan yang jelas, serta mendorong disiplin dan tanggung jawab pegawai.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi pelayanan dan sistem administrasi berbasis digital mempercepat proses layanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Koordinasi dengan Kelurahan

Hubungan kerja yang baik dengan kelurahan mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan

B. Analisis Penyebab Kegagalan atau penurunan Kinerja

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama di Kelurahan -
Kelurahan

Jumlah pegawai yang terbatas serta ketidakseimbangan kompetensi menyebabkan beban kerja tidak merata dan menurunkan efektivitas pelayanan.

2. Disiplin dan Motivasi Pegawai

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang responsif berdampak pada capaian kinerja.

C. Faktor Pendorong Peningkatan Kinerja

1. Dukungan anggaran yang memadai

2. Evaluasi kinerja secara berkala

3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan

4. Kerja sama lintas sektor yang semakin baik

D. Alternatif Solusi dan Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penguatan Sistem Pengawasan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target.

2. Optimalisasi Tata Kelola dan Pembagian Tugas

Menata kembali pembagian tugas dan fungsi pegawai sesuai kompetensi, serta memperkuat koordinasi internal untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan berbasis digital guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan kesalahan pelayanan.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Meningkatkan kerja sama dengan kelurahan, instansi terkait, serta unsur masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan guna memastikan pencapaian target serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Membuka ruang pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan perbaikan pelayanan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja kecamatan.

Strategi pemecahan masalah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan & kelurahan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda guna mencapai target sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan sehingga target dalam sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat tercapai. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3.50	3.97	113.43	48.056.354.886	45.601.023.617	94.89

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang.

Dalam rangka peningkatan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa strategi dalam mencapai tujuan Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

- 1) Mensinergikan program pelayanan dengan OPD yang menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Keselarasan data kependudukan;
- 3) Keselarasan data penerima bantuan pemerintah;
- 4) Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan komunitas;
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah;
- 6) Mensinergikan program pembangunan infrastruktur OPD dengan program di Kecamatan dan Kelurahan;
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 8) Adapun arah kebijakan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik instansi vertical maupun horizontal terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Sungai Pinang
- 9) Penerapan sistem manajemen pelayanan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, nyaman, aman, jelas serta terjaga profesionalisme petugas pelayanan;
- 10) Menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
- 11) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta mensinergikan basis data kependudukan;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengoptimalkan layanan dasar kesehatan dan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;



- 13) Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang membidangi Ekonomi kreatif;
- 14) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang ekonomi kreatif, lingkungan, kemasyarakatan, dan keagamaan;
- 15) Mengintegrasikan basis data UMKM antara OPD yang membidangi dengan Kecamatan Sungai Pinang;
- 16) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan serta melakukan pendampingan sehingga terwujud pembinaan yang berkelanjutan.
- 17) Meningkatkan peran serta lembaga sosial masyarakat;
- 18) Meningkatkan peran serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 19) Meningkatkan peran serta RT dan Linmas;
- 20) Meningkatkan indeks rasa aman, gotong royong dan toleransi;
- 21) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 22) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 23) Menciptakan stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

Dengan Upaya perbaikan kinerja maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Pinang semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana dengan tabel berikut :

Tabel 3.9

Analisa Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Program Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		



			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90 Persen	100 Persen		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		



			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	29 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	39 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	23 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	43 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	114 Unit		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		



			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas		
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan		
			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 keluarga	248 keluarga		



			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 keluarga	29 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 keluarga	39 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 keluarga	23 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 keluarga	43 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	114 keluarga	114 keluarga		



			Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah				76.00			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.55			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	85,00	85,00		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1		



				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	90,00%	90,00%		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	78		
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	90	90		



			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	90	90		
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		



			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	90	90		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	7		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	6		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1		



			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6	6		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	90	90		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1	1		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	90	90		



				Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	14		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6	6		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6	6		

8. Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun Anggaran sebesar Rp. 48.056.354.886,- Dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.601.023.617,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.89 %, dengan Silpa Rp. 2.455.331.269,-

Pencapaian Kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada kecamatan sungai pinang tahun 2025 berhasil dalam mencapai sasaran, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentasi Realisasi Anggaran
				Rp	Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			16.696.243.613	14.425.712.369	86.40 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.401.750	157.145.447	99.84
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	101.309.500	101.147.747	99.84
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	35.625.750	35.531.200	99.73



	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.466.500	20.466.500	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.971.000.715	12.160.531.645	87.04
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	11.998.115.590	10.418.214.413	86.83
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.924.667.000	1.694.099.382	88.02
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.218.125	48.217.850	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			56.875.000	52.247.996	91.86
	Bimbingan Teknis Implementasi		56.875.000	52.247.996	91.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah			361.799.500	349.613.233	96.63
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	32.450.000	32.450.000	100



		n Bangunan Kantor				
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	117.000.000	110.599.993	94.53
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		97.000.000	91.227.740	94.05
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor Yang Disediakan	11.500.000	11.500.000	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	36.450.000	36.450.000	100
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan Dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	3.000.000	2.998.000	99.93
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	11.988.000	99.90
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	52.399.500	52.399.500	100
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1.042.430.000	916.262.685	87.90
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	772.430.000	703.424.993	91.07



	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	50.000.000	41.930.000	83.86
	Pengadaan Mebel		46.000.000	39.682.695	86.27
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.000.000	9.960.000	99.60
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		64.000.000	21.715.000	33.93
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		100.000.000	99.549.997	99.55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365.396.648	351.111.063	96.09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	317.696.648	303.411.063	95.50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.700.000	5.700.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	42.000.000	42.000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik			741.340.000	438.800.300	59.19



	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	315.840.000	177.322.730	56.14
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan diabayakan pajak dan perizinan nya	88.000.000	63.560.845	72.23
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Yang dipelihara	25.000.000	24.980.000	99.92
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	212.500.000	74.417.270	35.02
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.000.000	100.000.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN			1.403.268.750	1.361.780.317	97.04



DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	1.403.268.750	1.361.780.317	97.04	
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			165.253.000	165.131.000	99.93	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	165.253.000	165.131.000	99.93	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	2.451.000.000	2.450.969.850	100%	



		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2.089.637.932	2.089.358.511	99.99%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	43.573.000	43.570.000	99.99%
KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	444.343.000	412.202.005	92.77%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan	8.049.200.000	8.048.386.600	99.99%



		Prasarana Kelurahan	Yang Terbangun dikelurahan			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	4.874.833.955	4.820.207.019	98.88%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	45.991.250	45.952.000	99.91%
KELURAHAN GUNUNG LINGAI						
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	164.789.500	163.589.300	99.27%
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			



		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	1.627.800.000	1.623.950.000	99.76%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.125.812.114	1.124.840.753	99.91%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	44.346.000	42.954.500	96.86%
KELURAHAN MUGIREJO						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	164.224.750	164.000.000	99.86%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan			



			masyarakat di kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	3.070.681.250	3.070.453.600	99.99%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.868.440.651	1.857.450.994	99.41%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	44.346.000	44.303.000	99.90%
KELURAHAN BANDARA						
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	165.525.125,	141.186.800	85.30%
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang			



			melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	2.082.692.500	2.081.370.000	99.94%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.277.309.296	1.276.941.824	99.97%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	45.294.450	34.976.800	77.22%

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16.696.243.613	14.425.712.369	86.40	2.270.531.244
2	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.507.404.125	2.407.889.422	98.98	99.514.703
3	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	28.852.707.148	28.767.421.826	99.35	85.285.322
	Jumlah	48.056.354.886	45.601.023.617	94.89	2.455.331.269

- Analisis Penggunaan Dana Tahun 2025

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda DPA Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan total nilai keseluruhan Belanja adalah sebesar Rp. **48.056.354.886** sedangkan realisasi anggaran Belanja mencapai Rp. **45.601.023.617,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **94.89 %**, dengan sisa Pagu Rp. **2.455.331.269,-** Dilihat dari tabel laporan realisasi capaian anggaran tahun 2025, penyerapan anggaran tahun 2025 untuk Kecamatan Sungai Pinang secara umum menunjukkan hasil yang relative baik, terlihat dari hasil Persentase capaian penyerapan anggaran yang mencapai 94.89 %.

B. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan proses pengukuran sistematis terhadap capaian dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat daerah.

Berikut Penilai Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Sungai Pinang.

Tabel 4.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,50	3,97	113,43%	110%	10%	99,00%	74
	Total Capaian PK (4)							99,00%	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							99,00%	
	Predikat PKO (6)							Baik	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. LAPORAN KINERJA (LKj) ini disusun sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 13/5278JDI.PAN-RBI1212014 tentang penyampaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 000.8.6.3/003/013.02 tanggal 03 Januari 2024 tentang mekanisme pengumpulan Data Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Samarinda.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Sungai Pinang terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024 umumnya menggambarkan kinerja yang optimal. Dari 2 sasaran strategi yang ditetapkan dalam rencana strategik hampir semua telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dicapai secara optimal.

Dengan LAPORAN KINERJA (LKj) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda, 2 Februari 2026

Pt. Camat Sungai Pinang



BIDIK PURWANTO, S.STP, M.Si
NIP. 198304152001121005



LAMPIRAN

**KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2025 - 2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025				SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		TW 1	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Indeks	UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	3,50				3,97	Kecamatan	



Samarinda, 2 Februari 2026
Plt. Camat Sungai Pinang

DIDIK PURWANTO, SSTP, M.Si
NIP. 198304152001121005

**PENGUKURAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Indeks	3,50				3,97



Samarinda, 2 Februari 2026
Plt. Camat Sungai Pinang

DIDIK PURWANTO, SSTP, M.Si
NIP. 198304152001121005

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Rp3,50



Samarinda, 2 Februari 2026

Plt. Camat Sungai Pinang

DIDIK BURWANTO, SSTP, M.Si
NIP. 198304152001121005

**MATRIKS TINDAK LANJUT SAKIP
KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	BUKTI DUKUNG	KETERANGAN	LINK DATA DUKUNG
1	Membuat Dokumen perencanaan kinerja yang dipublikasikan tepat waktu dengan melampirkan bukti tangkap layar dari website OPD dan Menpan	Menindaklanjuti Seluruh bukti tangkap layar dari website OPD dan Menpan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://docs.google.com/document/d/1L578EJ2Kj6GplmTZ9f7M1U2fRRN4x88/edit?usp=sharing&oid=109990375977692574654&rtpof=true&sd=true
2	Membuat Dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dengan membuat Tujuan dan sasaran, dan indikator sasaran dalam Renja selaras dengan Renstra	Menindaklanjuti atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dengan membuat Tujuan dan sasaran, dan indikator sasaran dalam Renja selaras dengan Renstra	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1uSZQuT938VrsmRiOJ6027_wpRil1Nmz5/view?usp=drive_link
3	Membuat Kualitas rumusan hasil (tujuan / sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan menselaraskan Tujuan / sasaran RENJA, IKU tahunan, Perjanjian Kinerja telah selaras dengan tujuan / sasaran kinerja di atasnya (RENSTRA)	Menindaklanjuti dengan menselaraskan Tujuan / sasaran RENJA, IKU tahunan, Perjanjian Kinerja telah selaras dengan tujuan / sasaran kinerja di atasnya (RENSTRA)	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1LiWq7KnP6c20Djt-PboiWYm2HALMmwa/view?usp=drive_link
4	Membuat Target dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan membuat Formulasi perhitungan target dan sumber data yang dilampirkan secara rinci bagaimana cara menghitung beserta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan	Menindaklanjuti Formulasi perhitungan target dan sumber data yang dilampirkan secara rinci bagaimana cara menghitung beserta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/182V5eIX4T3_OhZVeFnNTK9A2mEV5aal7/view?usp=drive_link
5	Melakukan pemantauan Rencana aksi kinerja secara berkala dengan melampirkan jadwal monitoring sesuai rencana aksi yang ditentukan. Selain itu mengunggah Bukti rapat per triwulan sesuai jadwal monitoring	Menindaklanjuti monitoring sesuai rencana aksi yang ditentukan. Selain itu mengunggah Bukti rapat per triwulan sesuai jadwal monitoring	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1TbHUeTeXTYL2es70AisHbkRqDrJKZsYR/view?usp=drive_link
6	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan membuat SOP pengumpulan data kinerja	Membuat Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1LSRvGow5UCmtH5uHPWnR421PdwhhwRx/view?usp=drive_link


7	Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja dengan melampirkan Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan	Menindaklanjuti Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1TbHUeTeXTYL2es70AisHbkRqDrJKZsYR/view?usp=drive_link
8	Mengumpulkan Data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dengan melampirkan seluruh Data dukung IKU	Menindaklanjuti Seluruh Data Dukung IKU	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1B25pXgNDQohCv0-rPme9y0D2tF9FLhd/view?usp=drive_link
9	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi dengan melampirkan Laporan pengukuran kinerja	Menindaklanjuti Seluruh Data Pengukuran Kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1MPdQfSMveeqQ8Og89CoI-eEoHD-lyclg/view?usp=drive_link
10	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) pada pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan menggunakan aplikasi atau spreadsheet & google drive dan aplikasi lain yang relevan	Menindaklanjuti Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) pada pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan menggunakan aplikasi atau spreadsheet & google drive dan aplikasi lain yang relevan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://docs.google.com/document/d/18v5N5G-UzFjx3drRAEX_FpTvK2oG2Qh/edit?usp=drive_link&oid=109990375977692574654&rtf_of=true&sd=true
11	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Menindaklanjuti pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/14BpSCU7kdsrRxCyraBvOQjUkUEo4u3aq/view?usp=drive_link
12	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Menindaklanjuti pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/14BpSCU7kdsrRxCyraBvOQjUkUEo4u3aq/view?usp=drive_link
13	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Menindaklanjuti Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/14BpSCU7kdsrRxCyraBvOQjUkUEo4u3aq/view?usp=drive_link

14	Melakukan pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dengan melampirkan Bukti dukung yang relevan	Menindaklanjuti pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1iGjYVvKauVYsdw8hsqm4KMhtf-3ZuRIQ/view?usp=drive_link
15	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Menindaklanjuti Dokumen Efisiensi Pengguna Anggaran	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1unsbZ4rb35ChLhn055kgH90zi5mpc3-0/edit?usp=drive_link&oid=109990375977692574654&rtpof=true&sd=true
16	Memberikan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja untuk setiap unit dan sub unit	Belum Menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja untuk setiap unit dan sub unit					
17	Memformalkan Dokumen Laporan Kinerja dengan memberikan nomor surat	Menindaklanjuti Dokumen Laporan Kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1sTz9JPqWu6vdPs8Ltak2_yBICjeseSJ1/view?usp=drive_link
18	Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja pada website OPD dan Menpan	Menindaklanjuti Seluruh bukti tangkap layar dari website OPD dan Menpan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://docs.google.com/document/d/1L578EJ2Kj6GplmTZ9f7M1U2fRRN4x88/edit?usp=haring&oid=109990375977692574654&rtpof=true&sd=true
19	Melengkapi substansi Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar	Menindaklanjuti Dokumen Laporan Kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1sTz9JPqWu6vdPs8Ltak2_yBICjeseSJ1/view?usp=drive_link
20	Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan mengundang seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan dalam pembahasan capaian kinerja	Belum Menindaklanjuti Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai dengan mengundang seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan dalam pembahasan capaian kinerja					

21	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan mencantumkan laporan Money per triwulan yang dapat merubah aktivitas kinerja/ tidakada perubahan aktivitas	Menindaklanjuti Seluruh Laporan Money - Per Triwulan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1F0p3cw09z1DGh3qqhLxtzISY4XPEZAI/view?usp=drive_link
22	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dengan melampirkan Laporan money per triwulan yang dimanfaatkan untuk penyesuaian penggunaan anggaran dan kegiatan dalam mencapai kinerja	Menindaklanjuti Seluruh Laporan Money - Per Triwulan	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1F0p3cw09z1DGh3qqhLxtzISY4XPEZAI/view?usp=drive_link
23	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dengan melampirkan rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1qpUHiJReu1RMGrDZ68HzjGOW4OFrUfZ/view?usp=drive_link
24	Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan melampirkan sertifikat atau daftar hadir beserta undangan mengikuti sosialisasi/diklat /bimtek/workshop AKIP	Menindaklanjuti Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan melampirkan sertifikat mengikuti sosialisasi/bimtek	Camat	07/08/2025	Dokumen	Tindak Lanjut	https://drive.google.com/file/d/1CvWw1aCZP4CeNkeuSEIdRL-eSaTeuS/view?usp=drive_link
25	Melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Kertas kerja pendukung evaluasi, faktor permasalahan, faktor hambatan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dilengkapi data dan bukti dukung	Beum Menindaklanjuti Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dengan melampirkan Kertas kerja pendukung evaluasi, faktor permasalahan, faktor hambatan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dilengkapi data dan bukti dukung					

Samarinda, 8 Agustus 2025
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Nunung Nurhayati, SE
NIP. 197008062007012023





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN (0541) 201250-201251
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ABDULLAH, M.Pd

Jabatan : Camat Sungai Pinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : Walikota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak kedua

ANDI HARUN

Pihak Pertama

Drs. ABDULLAH, M.Pd
NIP. 19680114 199512 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	3,50

Program :

- 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

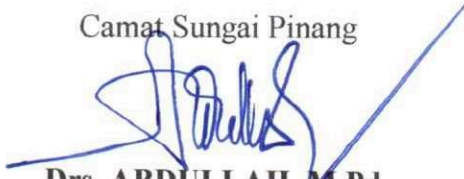
Anggaran :

Rp	16.696.243.613
Rp	2.507.404.125
Rp	26.334.544.845
Rp	-

Samarinda, 10 November 2025

Walikota Samarinda

ANDI HARUN

Camat Sungai Pinang

Drs. ABDULLAH, M.Pd
NIP. 19680114 199512 1 002